

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila tingkat kemakmuran ekonomi seseorang tergolong masih rendah, maka termasuk dalam kemiskinan. Berikut berbagai pendapat yang mengemukakan tentang kemiskinan.

Kemiskinan sebagai “Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being able go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear of the future, living one day at the time. Poverty is losing child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom”.(World Bank,2006)

Kemiskinan berkaitan dengan tidak memiliki tempat tinggal, tidak mampu untuk sekolah, apabila sakit tidak mampu berobat ke dokter dan tidak paham tentang baca tulis. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan sehingga menyebabkan takut menatap masa depan hidupnya, tidak mendapatkan akses untuk memperoleh sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya kebebasan dalam hidupnya. Secara menyeluruh, kemiskinan dapat diartikan kekurangan, yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan seseorang (Istifaiyah, 2015).

Ada beberapa hal yang dianggap termasuk dalam kategori hidup dalam kemiskinan seperti hidup serba kekurangan dengan tingkat pendapatan yang sedikit, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan rendah, mendapatkan

perlakuan yang tidak adil di mata hukum, terlalu mudah mendapatkan ancaman tindakan kriminal, serta tidak dapat mengambil keputusan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005).

Menurut (Wijayanto, 2010) kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga yaitu secara ekonomi, politik dan sosial psikologi. Secara ekonomi, kekurangan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan gambaran dari kemiskinan. Jika dilihat secara politik, kemiskinan dapat diukur dari tingkat kemudahan akses yang diperoleh terhadap kekuasaan yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya yang ada. Sementara secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan akses terhadap jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam upaya mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Masalah kemiskinan masih merupakan masalah primer di seluruh bagian dunia khususnya bagi negara berkembang seperti Negara Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya untuk pemerintah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan. Berikut ini faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia (Mardimin, 1996) :

- a. Negara Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, itu sebabnya sumber daya manusia kita kalah bersaing dengan sumber daya manusia dari luar negeri, hal itu berakibat pada banyak substansi-substansi yang lebih memilih melakukan impor tenaga kerja daripada memakai tenaga kerja sendiri dengan kualitas yang rendah. Indikator rendahnya

kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dipunya.

- b. Kurang tepatnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki sekarang ini.
- c. Pemerintah Daerah kurang peka dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah serta memperlambat aktivitas ekonomi daerah.

Menurut (Mardimin, 1996) Kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :

- a. Tingkat pendapatan nasional pada negara-negara berkembang terbilang cukup rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong masih lambat.
- b. Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita pada negara berkembang masih rendah dan sangat lambat, bahkan ada yang mengalami stagnasi atau tetap.
- c. Distribusi pendapatan pada negara berkembang mengalami ketimpangan atau sangat tidak merata.
- d. Mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolute.
- e. Masyarakat masih belum mudah mendapatkan akses fasilitas dan pelayanan terhadap kesehatan yang baik dan luas sehingga masih banyak masyarakat yang kekurangan gizi dan banyak wabah penyakit menyebar menyebabkan

tingkat kematian di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian di negara maju.

- f. Negara-negara berkembang memiliki fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai sehingga kurang menunjang kualitas pendidikan yang ada.

Oleh sebab itu, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah membenahi suatu kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kemiskinan misalnya, melakukan perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, serta pemerintah harus berupaya agar dapat meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan upaya tersebut, maka akan menciptakan produktivitas yang tinggi yang kemudian disusul dengan pendapatan yang tinggi sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, penyebab kemiskinan adalah pembangunan di daerah pedesaan masih belum merata. Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan diperkirakan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan. Selain itu, faktor penyebab kemiskinan yang lain adalah masyarakat miskin fasilitas-fasilitas yang semestinya didapatkan oleh masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi serta transportasi belum mudah untuk dijangkau. Masyarakat miskin masih sangat rentan terkena gizi buruk. Sampai saat ini, cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai menyebabkan gizi buruk terjadi. Masih kurang memadainya fasilitas bantuan publik yang diberikan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), bantuan sosial kepada masyarakat miskin

dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin. Pemerintah diharapkan mempunyai komitmen yang kuat untuk berupaya mengentaskan kemiskinan dengan memutus alur kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu akan terputus apabila satu bagian saja hilang dari lingkaran itu (Wiguna, 2013).

Berdasarkan kondisi kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Sumarsono, 2003) :

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga menyebabkan seseorang tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan serta kesehatan dengan kondisi tersebut maka seseorang tidak bisa untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Garis kemiskinan merupakan konsumsi rata-rata yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan hidup masyarakat. Konsep untuk menentukan atau menggambarkan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang tergolong miskin didapat dari kemiskinan absolut ini.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya ketimpangan dalam masyarakat meliputi ketimpangan standar kesejahteraan atau ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan daerah yang belum merata di semua lapisan masyarakat. Daerah tertinggal dapat

dikategorikan sebagai daerah yang pada umumnya belum tercakupi oleh program-program pembangunan selain itu masyarakatnya tergolong mempunyai penghasilan yang rendah dan pengeluaran lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan salah satu bentuk kemiskinan yang sering terjadi karena masyarakat pada umumnya memiliki sikap atau kebiasaan yang tidak mau merubah taraf hidupnya secara modern melainkan hanya berpegang pada keadaan atau adat-istiadat yang sudah ada sejak lama di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kebiasaan seperti ini dapat menyebabkan seseorang bersikap seperti boros belanja hal yang tidak dibutuhkan, sikap kurang kreatif, sikap malas akan semua hal, dan sikap tidak dapat hidup mandiri atau hanya menggantungkan diri pada orang lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena akses terhadap sumber daya yang belum mendukung dan umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial, politik maupun budaya yang kurang mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Masih terdapat unsur diskriminatif dalam bentuk kemiskinan struktural ini. Dalam ilmu sosial, bentuk kemiskinan seperti ini cukup sering kita temui.

Kemiskinan struktural ini kerap menimbulkan berbagai macam bentuk kemiskinan. Kemiskinan struktural berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang terbentuk karena tanah yang tidak subur dan terjadi kelangkaan sumber daya alam di daerah tersebut. Kemiskinan alamiah dapat menyebabkan daerah-daerah menjadi tidak terjangkau oleh pembangunan yang ada. Daerah tertinggal dapat dikategorikan sebagai daerah yang pada umumnya kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah daerah tersebut belum merata.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang ketika masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menguasai fasilitas, sarana dan sumber daya ekonomi secara utuh dan merata disebabkan oleh pembangunan. Kemiskinan buatan seperti ini merupakan dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan. Pada umumnya kemiskinan buatan ini dilaksanakan pada negara-negara berkembang. Memasang target pertumbuhan ekonomi yang progresif menyebabkan pembangunan tidak merata hal tersebut digambarkan dengan tidak meratanya pembagian hasil pembangunan di masing-masing sektor misalnya sektor pertanian memiliki tingkat keuntungan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor industri yang memiliki tingkat

keuntungan lebih besar. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk pemerataan pembangunan di setiap daerah.

Tiga aspek kemiskinan yang perlu diketahui, yaitu (Kuncoro, 1997) :

Pertama, kemiskinan multidimensi yang artinya kemiskinan memiliki banyak aspek jika dilihat dari kebutuhan manusia yang bermacam-macam bentuknya. Kebijakan umum kemiskinan terdiri dari dua aspek yaitu meliputi aspek primer yang berupa miskin akan pengetahuan, keterampilan yang dikuasai, serta aset-aset yang dipunyainya dan aspek yang sekunder merupakan miskin sumber-sumber penghasilan, informasi dan jaringan sosial. Kemiskinan tersebut seperti maraknya terjadi kekurangan gizi, air dan pendidikan kurang baik dan merata, akses kesehatan masih sulit serta perumahan yang tidak sehat.

Kedua, aspek kemiskinan ini saling berkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung berarti apabila terjadi kemajuan pada suatu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya begitupun sebaliknya.

Ketiga, bahwa yang miskin adalah manusia itu sendiri baik secara individual maupun kolektif. Waktu mereka tersita untuk mencari penghasilan karena tingkat pendidikan rendah sehingga memaksa mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau layak.

2. Ukuran Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mengukur kemiskinan yang disebut dengan *basic need approach*. Dengan pendekatan ini kemiskinan apabila diukur dari sisi pengeluaran dapat diartikan sebagai ketidakmampuan manusia dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang dan papan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (GK) disebut penduduk miskin. Dan perhitungan penduduk miskin dapat dilakukan pada daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat yaitu masyarakat tergolong miskin apabila berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari dan pendapatan yang dimiliki berada di bawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan jumlah tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makan maupun non makan. Dapat diukur dari kebutuhan minimum makanan yang dikonsumsi per hari dipatok sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Berbeda halnya dengan kebutuhan minimum non pangan seperti untuk pendidikan, kesehatan dan perumahan. Kebutuhan dasar tersebut diwakili oleh 47 jenis komoditi di daerah pedesaan dan 51 jenis komoditi daerah perkotaan (Saragih, 2014:143).

Menurut World Bank, standar ukuran kemiskinan ditetapkan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang tergolong miskin adalah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari sepertiga rata-rata

pendapatan per kapital nasional. Dalam konteks ini, maka World Bank dapat menyimpulkan ukuran kemiskinan yaitu sebesar \$2 per orang per hari (Kadji, 2009).

Menurut Foster Greer Thorbecke 1984 dalam (Fatony, 2011), perhitungan indikator kemiskinan telah dirumuskan yaitu suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan yang ada, dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Dimana :

a : 0,1,2

z : Garis Kemiskinan

yi : Rata-rata pengeluaran per kapital yang digunakan dalam waktu sebulan untuk penduduk yang berada dalam Garis Kemiskinan ($i = 1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q : Banyaknya jumlah penduduk dalam yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)

n : Jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$, maka diperoleh Head count Index (P0), jika $\alpha = 1$, maka diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*) serta apabila

$\alpha = 2$ maka disebut dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks-P2*).

3. Penyebab Kemiskinan

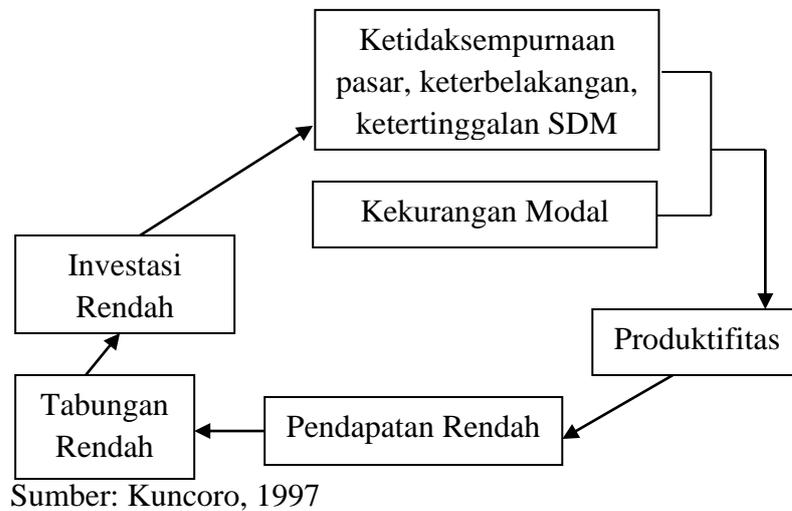
Cukup banyak penjelasan mengenai apa saja hal penyebab terjadinya kemiskinan, misalkan kemiskinan yang terjadi di beberapa negara terutama negara berkembang disebabkan karena baru saja merasakan merdeka setelah perang Dunia II sehingga perekonomian negara tersebut belum stabil itulah akar permasalahan kemiskinan (Kuncoro, 1997).

Menurut (Kuncoro 1997), banyaknya penduduk sebuah Negara miskin lebih disebabkan karena penduduk di negara miskin bergantung hanya pada mata pencaharian sektor pertanian yang pada dasarnya sistem produksi yang dipakai masih menggunakan cara tradisional dan mayoritas masyarakat seringkali bersikap apatis terhadap lingkungan.

Mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, kemiskinan dipandang secara mikro yaitu kemiskinan muncul akibat terdapat perbedaan pada pola kepemilikan sumber daya sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat, dalam hal ini penduduk miskin memiliki sumber daya yang sangat terbatas dan kualitasnya rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang kaya hasilnya sumber daya yang dimiliki baik jumlah dan kualitasnya sangatlah berbanding

terbalik, dimana penduduk yang dalam kategori kaya dalam hal ini memiliki sumber daya yang berkualitas tinggi dan berjumlah banyak. *Kedua* kemiskinan terjadi akibat perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan tingkat produktivitasnya rendah sehingga mereka mendapatkan upah yang rendah pula, kualitas sumber daya yang rendah ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, adanya diskriminasi, menerima nasib yang kurang beruntung atau berasal dari keluarga miskin. *Ketiga*, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses dalam modal. Apakah seseorang mendapatkan akses yang mudah dalam mencari modal atau mengalami kesulitan akses dalam mencari modal (Sukmaraga, 2011).

Ketiga penyebab terjadinya kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*), dimana ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan serta kurangnya modal yang dimiliki menyebabkan tingkat produktivitas seseorang menjadi rendah. Apabila tingkat produktivitas seseorang rendah, maka mengakibatkan tingkat pendapatan yang mereka terima rendah (Sukmaraga, 2011)

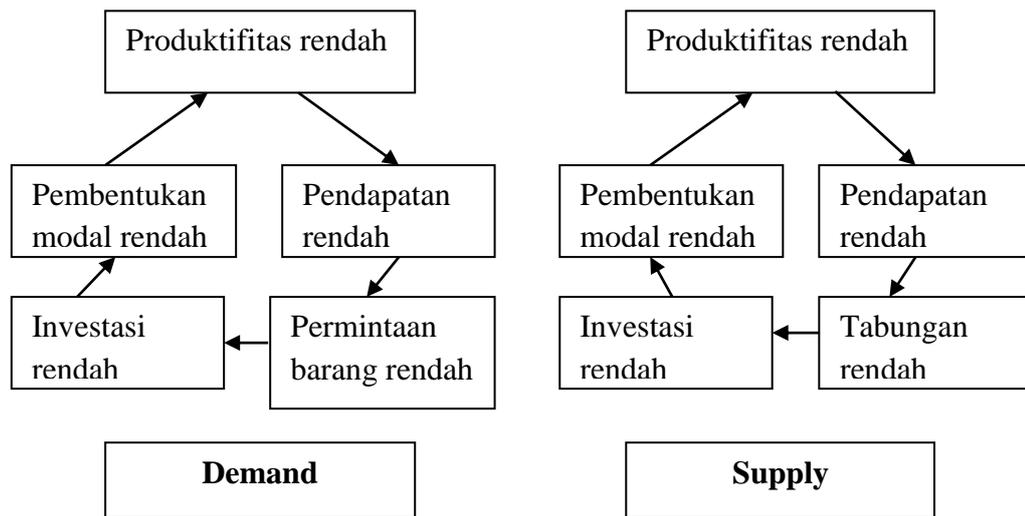


Gambar 2.1
Lingkaran Kemiskinan

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, apabila tingkat pendapatan rendah maka mengakibatkan tingkat tabungan/investasi rendah. Rendahnya tingkat investasi berakibat pada keterbelakangan, kekurangan modal, produktivitas rendah dan seterusnya. Di negara-negara miskin tidak mungkin dilakukan pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka dari itu, akan berdampak buruk bagi negara dimana masyarakatnya akan terjat dalam lingkaran kemiskinan yang ada (Kuncoro, 1997).

Setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki namun hal tersebut harus disertai dengan tenaga kerja yang memiliki skill mumpuni sehingga dapat melakukan berbagai macam pekerjaan. Di negara berkembang, Sumber Daya Alam yang melimpah belum dapat sepenuhnya dikembangkan dikarenakan mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, sehingga tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pengelolaan kekayaan sumber

daya alam terbatas selain itu modal yang dimiliki negara berkembang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dirasa masih sangat minim. (Saragih, 2014).



Gambar 2.2

Lingkaran Kemiskinan tak Berujung pangkal, oleh Nurkse

Menurut pandangan Nurkse ada 2 hal yang dapat menjadikan seseorang masuk dalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal yaitu *pertama*, dilihat dari sisi permintaan (*Demand*), apabila terjadi sesuatu pada negara miskin dikarenakan penanaman modal yang sangat kurang serta akibat terbatasnya pasar maka pembagian barang menjadi sangat terbatas. Apabila hal tersebut terus terjadi menyebabkan pendapatan rendah karena tingkat produktivitas juga menurun hingga pada akhirnya mengakibatkan hasrat untuk menanam modal berkurang drastis begitu seterusnya. Kedua, penawaran (*Supply*), apabila tingkat pendapatan yang diperoleh penduduk rendah maka dapat berdampak pada tingkat produktifitas rendah, sehingga hasrat untuk

menabung dan berinvestasi rendah. Hal itu dapat berakibat pada kurangnya modal dan begitu seterusnya perekonomian berputar tiada ujung.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang penyebab kemiskinan di masyarakat, ada 2 pendapat atau teori yang digunakan untuk menjelaskan akar dari kemiskinan yaitu teori ketergantungan dan teori marginalisasi. Teori marginalisasi sendiri menjelaskan tentang kemiskinan disebabkan oleh tabiat apatis, ketergantungan, pemborosan, rendah hati, dan konsumtif, serta seseorang kurang memiliki jiwa wiraswasta (Kadji, 2009).

4. Indikator-indikator Kemiskinan

Beberapa indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari BPS yaitu:

- 1) Ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-harinya (sandang, pangan dan papan).
- 2) Tidak memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti: (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan transportasi).
- 3) Tidak memiliki jaminan untuk kehidupan di masa depan (karena tidak memiliki investasi untuk keluarga dan pendidikan).
- 4) Kualitas sumber daya manusia masih rendah dan sumber daya alam yang tersedia masih terbatas sehingga menyebabkan kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.
- 5) Dalam kegiatan sosial masyarakat kurang membangun dan berpartisipasi.
- 6) Sulit mendapatkan akses dalam mencari pekerjaan dengan gaji tetap.
- 7) Faktor modal dan cacat fisik maupun mental menjadi indikator kemiskinan karena seseorang menjadi kurang berusaha.

- 8) Ketidaktergantungan dan ketidakmampuan sosial seperti tidak sekolah, menjadi korban kekerasan rumah tangga, kelompok terpencil atau minoritas, tidak memiliki tempat tinggal atau terlantar, wanita menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan UMK dan Kemiskinan

Sumber utama penghasilan seseorang disebut upah, oleh sebab itu upah harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga berupa pangan, sandang dan papan dengan wajar. Upah merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau perundang-undangan. Upah diberikan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerjanya termasuk tunjangan, tunjangan diperuntukan bagi para pekerja itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang telah dilakukan ataupun diberikan pekerja tersebut kepada pengusaha. Upah diberikan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja yang diberikan pekerja kepada pengusaha (Sumarsono, 2003).

Dalam pasar tenaga kerja, besar atau kecilnya upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sangat penting untuk ditetapkan. Untuk itu, undang-undang upah minimum sangat perlu menetapkan harga terendah atau upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja. (Mankiw,

2006). Upah minimum ditetapkan dengan tujuan memenuhi standar hidup minimum atau memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti untuk makanan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan efisiensi. Upah minimum berfungsi agar dapat mengangkat tingkat kemakmuran pekerja yang berpendapatan rendah dan terutama penduduk miskin.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Upah Minimum merupakan upah bulanan minimum yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini berlaku bagi mereka yang belum berkeluarga dan paling tidak sudah memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, hal ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi para pekerja yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan ketentuan ini berlaku selama 1 (satu) tahun berjalan. (Khabibi, 2010)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 undang-undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan upah merupakan hak bagi para pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Wijayanti, 2007:107)

Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 menjelaskan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi para pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Berdasarkan definisi tersebut, ada dua

unsur penting mengenai ketentuan upah minimum (Sumarsono, 2003:16) yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Upah permulaan merupakan upah paling rendah yang diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia bekerja.
- b. Jumlah upah minimum yang diberikan haruslah dapat mencukupi kebutuhan dasar buruh secara minimal yaitu meliputi kebutuhan untuk pangan, sandang, dan tempat tinggal.

Menurut Sumarsono (2003:18) upah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar para pekerja dan keluarganya karena upah merupakan penghasilan utama pekerja. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) merupakan suatu batas paling wajar di Indonesia dengan mengukur kehidupan layak bagi pekerja dapat disebut juga sebagai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

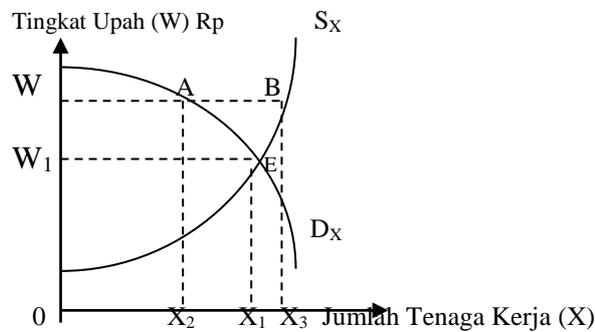
Otonomi daerah mengatur kebijakan tentang ketenagakerjaan termasuk tentang kebijakan upah minimum bagi pekerja. Undang-Undang No 13 tahun 2003 mengatur tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara lain:

- a. Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga diharapkan Upah minimum dapat memenuhi standar minimum kebutuhan hidup yang layak bagi para pekerja.
- b. Upah Minimum ditetapkan berdasarkan perbedaan wilayah kabupaten/kota atau provinsi. Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok lapangan usaha dengan dibagi menurut klasifikasi lapangan usaha apa saja yang ada di Indonesia. Adapun penetapan besar/kecil jumlah upah

kabupaten/kota tidak boleh lebih rendah dari upah minimum daerah regional yang telah ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

- c. Penetapan Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan tetap mengacu pada rekomendasi dari Bupati/Walikota daerah masing-masing.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dalam hal ini pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum dimaksudkan agar pekerja terbebas dari perusahaan yang tidak mampu memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku.

Gambar 2.3
Penetapan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja



Sumber : Kuncoro, 1997

Gambar 2.3 menjelaskan tentang penetapan upah minimum pada pasar persaingan sempurna. Gambar di atas menjelaskan W₁ merupakan tingkat upah minimum OX₁ merupakan jumlah orang yang bekerja dimana titik keseimbangan berada pada titik E sebelum peraturan yang berlaku ditetapkan. Tingkat upah tidak bisa turun ke bawah dan mengakibatkan permintaan tenaga kerja turun ke OX₂ sementara itu OX₃ adalah jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tingkat upah yang lebih tinggi harus dibayarkan dengan ongkos sosial X₂,X₁ dimana yang semula bekerja sekarang kehilangan pekerjaan (Soemarsono, 2003).

Beberapa negara baik negara berkembang maupun negara maju telah menjadikan kebijakan mengenai upah minimum sebagai isu penting dalam masalah ketenagakerjaan. Tujuan penerapan kebijakan upah minimum ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.

Kebutuhan dasar pekerja meliputi kesehatan, kesejahteraan pekerja dan efisiensi. Tujuan utama upah minimum adalah upaya agar penduduk dapat

memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga kesejahteraan meningkat dan terbebas dari kemiskinan. (Khabhibi, 2010:49).

Menurut Jundi (2014), apabila upah minimum meningkat maka pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga kesejahteraan pekerja membaik dengan begitu tingkat kemiskinan menurun. Dengan demikian, upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, apabila upah minimum dalam masyarakat meningkat maka angka kemiskinan yang ada menjadi berkurang.

2. Hubungan Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran merupakan seseorang yang sudah tergolong dalam suatu angkatan kerja yang sedang mencari upah sesuai dengan kualitasnya, dalam artian mereka menolak pekerjaan yang ada karena mereka memilih pekerjaan apa yang sekiranya upah yang mereka terima sesuai dengan kualitas yang mereka punya atau dapat dikatakan pengangguran apabila seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak tergolong dalam angkatan kerja dengan kata lain mereka yang masih bersekolah.

Menurut Sholekah (2016) ada beberapa teori menjelaskan tentang teori-teori pengangguran yaitu :

a. Teori Keynes

Menurut Keynes penyebab masalah pengangguran adalah munculnya permintaan agregat yang rendah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan rendahnya konsumsi bukan rendahnya produksi. Menurut Keynes, hal tersebut tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar karena ketika tenaga kerja meningkat maka upah pekerja akan menurun, apabila upah menurun maka akan menurunkan daya beli masyarakat dan produsen mengalami kerugian hingga tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja.

b. Teori Malthus

Pertumbuhan penduduk terus meningkat hingga mencapai batas persediaan makanan yang ada, hal ini mengakibatkan penduduk mencari sumber makanan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih dan tidak mampu memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern, semakin meningkat jumlah penduduk maka akan semakin banyak angkatan kerja yang dihasilkan, namun kesempatan kerja yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya angkatan kerja. Hal tersebut dikarenakan individu akan bersaing satu sama lain untuk memperoleh pekerjaan dan individu yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi golongan penganggur. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada.

Terdapat hubungan yang berkaitan antara luasnya kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, dan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Golongan masyarakat yang sangat miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) sedangkan mereka yang bekerja di pemerintahan maupun sektor swasta dengan bayaran yang tetap termasuk golongan masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, anggapan bahwa orang yang berkerja secara penuh adalah orang kaya dan orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah miskin tidak sepenuhnya benar. Hal tersebut karena terkadang ada seseorang yang tidak bekerja secara suka rela dikarenakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya sehingga mereka mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Dalam kasus lain, sebagian dari mereka dapat dengan mudah menolak pekerjaan yang mereka rasakan tingkat pendapatannya lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber penghasilan lain yang lebih menjanjikan. (Arsyad, 2004).

Banyak rumah tangga menggantungkan hidup pada hasil upah atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya, apabila seseorang kehilangan pekerjaan maka upah atau pendapatan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari juga akan berkurang, biasanya hal ini terjadi pada masyarakat menengah kebawah atau berpenghasilan rendah, sehingga dapat menggeser masyarakat pada garis kemiskinan, hal ini berarti apabila tingkat pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Jadi, pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. (Jundi, 2014)

3. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan

Dalam teori pembangunan ekonomi menyatakan bahwa peningkatan pembangunan modal manusia (*human capital*) merupakan faktor penting guna mendorong pengembangan produktivitas manusia sehingga kesejahteraan sosial dapat meningkat.

Menurut (Todaro, 2011), pada sisi permintaan, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan yaitu pertama, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan. Faktor kedua, biaya pendidikan yang dibebankan dan harus ditanggung seorang peserta didik atau keluarganya. Dengan demikian untuk mendapatkan kesempatan kerja berupah tinggi di sektor modern diperlukan pula seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

Pada sisi penawaran, kuantitas pendidikan lebih ditentukan oleh proses politik dibandingkan proses ekonomi. Karena besarnya tekanan politik pada sebagian besar Negara berkembang untuk meningkatkan jumlah sekolah yang ada diharapkan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dengan begitu kita dapat dengan mudah berasumsi bahwa pengeluaran pemerintah menetapkan penawaran publik atas tingkat pendidikan yang pada dasarnya tingkat pendidikan dipengaruhi oleh tingkat permintaan pribadi agregat (Todaro, 2011).

Peran pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kemampuan khususnya negara berkembang untuk menyerap teknologi modern yang didapatkan dari negara maju serta mengembangkan produktivitas dan kapasitas

agar pembangunan yang berkelanjutan dapat tercipta (Todaro, 2006). Pendidikan berkaitan dengan kemiskinan. Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik akan memiliki tingkat pendapatan yang baik. Seseorang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan. Apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan yang baik maka akan lebih kecil kemungkinan seseorang tersebut menjadi miskin begitupun sebaliknya. Salah satu karakteristik pendidikan adalah kemampuan baca tulis seseorang yang ditunjukkan dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah mengindikasikan seberapa banyak seseorang memperoleh pendidikan dan seberapa tinggi pendidikan individu tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu individu, maka pengetahuan serta keahlian akan bertambah sehingga produktivitas akan meningkat.

4. Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kesehatan. Menurut Astuti (2015) bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan merupakan cara untuk mengurangi angka kemiskinan. Peningkatan daya kerja dapat dipengaruhi oleh kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik dapat menaikkan output energi sehingga berpengaruh negative terhadap kemiskinan. Menurut Amelia (2012) dalam

teori pembangunan ekonomi menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pentingnya meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) guna menurunkan tingkat kemiskinan.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai kemiskinan di berbagai wilayah di dunia termasuk di Indonesia yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Data/Sampel	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Van Indra A Wiguna (2013), Pengaruh PDRB, Pendidikan dan pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Data Tahunan Periode 2005-2010	Dependen: Kemiskinan, Independen: PDRB, Pendidikan, Pengangguran	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i> dengan dibantu data panel	PDRB dan Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
2	Rusdiati dan Lesta Karolina (2013), Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Data from 2008-2012	Jumlah Penduduk Miskin, PDRB, Pengangguran, Belanja Publik	Panel Regression (<i>Fixed Effect</i>)	Hasil penelitian menunjukkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengeluaran publik berpengaruh terhadap kemiskinan.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Data/Sampel	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Fatkhul Mufid Cholili (2014), Pengangguran, PDRB dan IPM terhadap kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia	Data tahun 1983 sampai 2013	Independen: Kemiskinan, Dependen: Jumlah Penduduk Miskin, PDRB dan IPM	Regresi Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>)	Adanya pengaruh stimulan dari ketiga variabel independen. Namun secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan Terhadap kemiskinan IPM dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
4	Lailatul Istifaiyah (2015), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan 2009-2013)	Data tahun 2009 sampai 2013	Independen: Kemiskinan Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran	APanel A Regresion (<i>Fixed Effect</i>)	Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
5	Hana Ainin Nabila (2015), Pengaruh PDRB, IPM dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia	Data period from 1984-2015	Independen: PDRB, IPM dan Pengangguran Dependen: Kemiskinan	Error Correction Model (ECM)	Secara stimulan PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan, IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan sementara pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Data/Sampel	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	Darma (2016), Analisis Sumber Kemiskinan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)	Data tahunan periode 1986 sampai 2015	Independen: Jumlah Keluarga, Jumlah jam kerja, luas lahan, pendidikan, keadaan jalan Dependen: Kemiskinan	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Jumlah keluarga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, jumlah jam kerja, luas lahan, pendidikan, keadaan jalan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
7	Adelami Minsya Stani (2016), Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Data tahun 2012 sampai tahun 2015	Dependen: Kemiskinan Independen: Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pendidikan	Panel Regresi (<i>Fixed Effect</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel pendidikan dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
8	Suzanne Duryea (2014), Kebijakan Sumber Daya	Dari tahun 1980-2012	Independen: Upah Tenaga Kerja, Pendidikan,	Error Correction Model (ECM)	Upah Tenaga Kerja, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Data/Sampel	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Manusia: Apa yang Bisa dilakukan untuk Menanggulangi dan Mengurangi Kemiskinan di Amerika Latin		Pertumbuhan Ekonomi Dependen: Kemiskinan		terhadap Kemiskinan di AmerikaLatin. Upah Tenaga Kerja dan Pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Amerika Latin. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Amerika Latin.
9	Oluwatayo (2014), Solusi Pencegahan Kemiskinan Multidimensi di Nigeria bagian Barat Daya.	Dari tahun 2010-2014	Independen: Populasi Penduduk, Konsumsi Penduduk, Pendidikan Dependen: Kemiskinan	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect</i>)	Hasil penelitian menunjukkan populasi penduduk berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan di Nigeria bagian Barat Daya sementara pendidikan dan konsumsi bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Nigeria bagian Barat Daya.
10	Zainuddin Ibnurrasya (2016), Pengaruh Invest, Tenaga Kerja, Jumlah Peduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap	Dari tahun 2004-2014	Independen: Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah	Panel Regresi (<i>Fixed Effect</i>)	Invest, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh pada pertumb. ekonomi di Provinsi DIY. Secara parsial, invest dan pengeluaran pemerintah

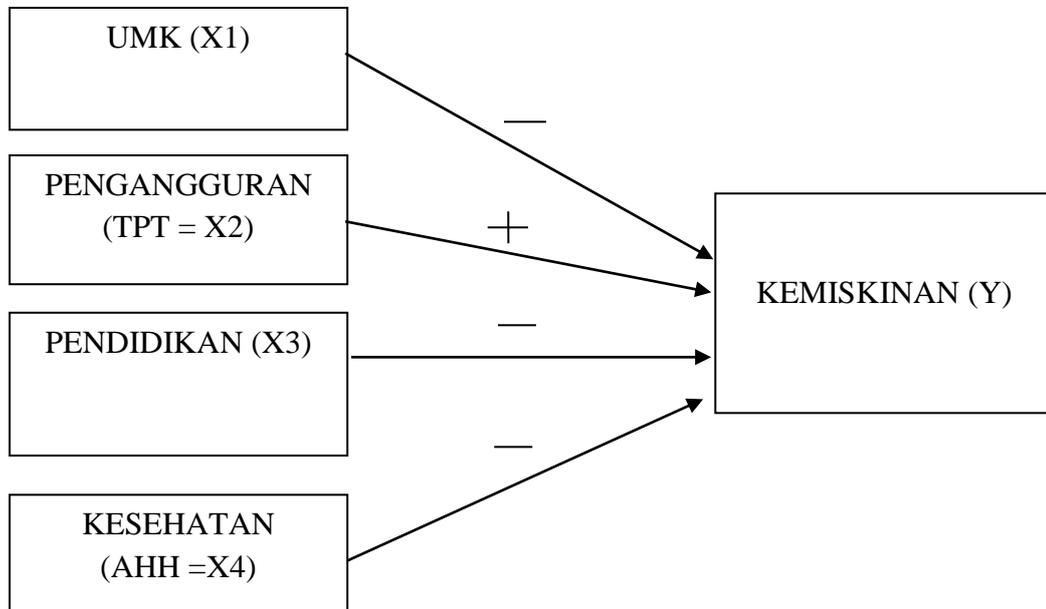
No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Data/Sampel	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DIY dari tahun 2004-2014.		Dependen: Pertumbuhan Ekonomi		berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY sementara tenaga kerja, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY.

D. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan ada empat variabel, antara lain : Tingkat pengangguran yaitu menggambarkan kemampuan negara dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan menunjukkan kemampuan atau kualitas sumber daya manusia dalam bekerja yang berpengaruh terhadap produktifitas meningkat dan pendapatan yang diterima. Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk menggambarkan kesejahteraan para pekerja dengan indikator pendapatan yang diterima di Jawa Tengah. Variabel terakhir yaitu kesehatan yang menggambarkan semakin tinggi Angka Harapan Hidup maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Kesehatan merupakan variabel independen, dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Kelima variabel tersebut terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen akan diuji untuk mendapatkan tingkat signifikannya. Sehingga hasilnya diharapkan mendapat tingkat signifikan pada setiap variabel independen dalam mempengaruhi variable kemiskinan. Selanjutnya dengan hasil yang signifikan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan di Jawa Tengah sehingga dapat ditindaklanjuti untuk melakukan suatu kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Dari uraian di atas, maka dapat disusun skema sebagai berikut :



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau pendapat sementara dalam menentukan arah dari sebuah permasalahan penelitian yang sebenarnya masih harus diuji kembali. Menurut (Supardi,2005) hipotesis merupakan jawaban yang masih sementara dari suatu permasalahan penelitian, yang harus dijawab secara nyata melalui penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang mampu membenarkan hipotesis penelitian, walaupun pada kenyataannya memang hipotesis penelitian tidak dengan sendirinya harus terbukti kebenarannya,

akan tetapi apapun hasilnya yang lebih penting adalah kemampuan peneliti untuk dapat mencari dan mengumpulkan jawaban dengan data, fakta lapangan yang sebenarnya terjadi.

Dengan mengacu pada studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini dan dengan dasar pemikiran yang bersifat teoritis, maka akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota diduga memiliki pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai 2016.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diduga memiliki pengaruh positif terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai 2016.
3. Pendidikan diduga memiliki pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai 2016.
4. Kesehatan (Angka Harapan Hidup) diduga memiliki pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai 2016.